



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENY FAUZIAH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 242673

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.470.000.000

1. Tanah Seluas 2400 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 370.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/144 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 3600 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 128.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.850.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 44.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.674.600.000



III. HUTANG

Rp. 11.345.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.663.254.200

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.